

# STRATEGI SEKOLAH DALAM MENERAPKAN PENDIDIKAN DEMOKRASI SEBAGAI WUJUD IMPLEMENTASI NILAI-NILAI PANCASILA (STUDI PADA SMAN 1 KERTOSONO)

**Mustika Damaresti**

12040254220 (Prodi S1 PPKn, FISH, Universitas Negeri Surabaya) mustikadamaresti@gmail.com

**Harmanto**

0001047104 (Prodi S1 PPKn, FISH, Universitas Negeri Surabaya) harmantofisunesa@gmail.com

## Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan strategi sekolah dalam menerapkan pendidikan demokrasi sebagai wujud nilai-nilai Pancasila di SMAN 1 Kertosono. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Informan penelitian ini berjumlah 5 orang, yaitu Kepala Sekolah, guru PPKn, guru BK, Pembina OSIS/Ekstrakurikuler, dan siswa yang ikut OSIS/Ekstrakurikuler. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumen. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan beberapa langkah yaitu mengolah data, mereduksi data, menyajikan data, dan menulis hasil kesimpulan dari Miles dan Huberman. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa strategi yang digunakan untuk penerapan pendidikan demokrasi sebagai wujud implementasi nilai-nilai Pancasila melalui kotak saran, kepuasan pelanggan, pemilu, serta melalui diskusi di kelas. Hambatan dalam menjalankan strategi ini adalah adanya keluhan siswa dan wali siswa yang berbeda-beda, kurangnya rasa tanggung jawab pada siswa, minimnya rasa keberanian pada siswa untuk mengisi kotak saran, kurangnya rasa percaya diri pada calon kandidat pada saat pemilu, serta minimnya pemahaman siswa mengenai diskusi yang baik. Solusi yang ditempuh untuk mengatasi hambatan adalah menetapkan prioritas dalam kepuasan pelanggan, mengadakan sosialisasi kotak saran, memberikan motivasi dan pengarahan pada kandidat, mengadakan LDKS, serta memberikan penguatan mengenai diskusi yang baik.

**Kata Kunci:** strategi, pendidikan demokrasi, nilai-nilai Pancasila

## Abstract

This study aims to describe the school's strategy in implementing democratic education as a form of Pancasila values in SMAN 1 Kertosono. The informants from this study amounted to 5 people, namely the principal, PPKn teacher, BK teacher, student/extracurricular board, and students who participated in the student council/extracurricular. This study uses a qualitative approach with descriptive methods. Data collection techniques are carried out through several strategies, namely observation, interviews, and documents. The data analysis technique used in this study uses several steps, namely processing data, reducing data, presenting data, and writing conclusions from Miles and Huberman. The results of this study indicate that the strategy used for the implementation of democratic education as a manifestation of the implementation of Pancasila is carried out through a democratic culture, by entering the suggestion box, customer satisfaction, elections, and through class discussion. Obstacles in carrying out this strategy are the complaints from students and the parents, lack of sense of responsibility to students, courage in students to fill in suggestion boxes, confidence in prospective candidates during elections, and students' understanding of good discussion. The solution taken to overcome obstacles is to priorities in customer satisfaction, conduct suggestion box socialization, provide motivation and direction to candidates, hold LDKSs, and provide reinforcement regarding good discussion.

**Keywords:** Strategy, Democracy Education, Values of Pancasila

## PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang menganut ideologi Pancasila, sehingga Pancasila memiliki kedudukan yang sangat fundamental bagi kehidupan berbangsa dan

bernegara bangsa Indonesia. Sebagai ideologi bangsa Pancasila memiliki berbagai kedudukan yang multimendisonal sesuai dengan fungsinya. Pancasila dapat diposisikan sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia, Pancasila sebagai dasar filsafat bangsa Indonesia, Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara

Indonesia serta masih banyak lainnya. Keseluruhan dari kedudukan dan fungsi Pancasila tidaklah berdiri sendiri namun saling berhubungan secara holistik, sehingga dapat dikelompokkan menjadi dua kedudukan dan fungsi Pancasila yaitu Pancasila sebagai dasar filsafat bangsa Indonesia dan sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia (Kaelan, 2002 : 46)

Pancasila sebagai dasar filsafat bangsa Indonesia pada hakekatnya merupakan suatu nilai-nilai yang bersifat sistematis, fundamental serta menyeluruh. Untuk itu sila-sila Pancasila merupakan keseluruhan nilai-nilai yang bersifat bulat serta hierarkhis dan sistematis, sehingga sila-sila Pancasila merupakan suatu sistem filsafat. Konsekuensinya kelima sila Pancasila bukan merupakan sila yang berdiri sendiri-sendiri, melainkan saling terkait satu sama lain membentuk sebuah sistem sebagai wujud dari falsafah bangsa dan negara Republik Indonesia dalam setiap aspek kehidupan kebangsaan, kemasyarakatan dan kenegaraan harus berdasarkan nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan.

Pancasila sila keempat, kerakyatan berasal dari kata rakyat. Rakyat merupakan sekelompok manusia yang berdiam dalam suatu wilayah negara tertentu. Dengan demikian, seluruh rakyat Indonesia memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, pada sila keempat ini juga menegaskan bahwa Indonesia menganut sistem demokrasi baik secara langsung maupun tidak langsung. Penerapan sistem demokrasi langsung untuk negara yang memiliki luas wilayah sangat luas serta jumlah penduduk yang padat seperti Indonesia akan sangat sulit untuk dilakukan, sehingga demokrasi tidak langsung (perwakilan) penting untuk diterapkan di Indonesia.

Dalam perspektif teoritis, demokrasi sering dipahami sebagai mayoritarianisme, yaitu kekuasaan yang dimiliki oleh mayoritas rakyat lewat wakil-wakilnya yang dipilih melalui proses pemilihan demokratis (Soedarsih, 2009 : 62). Pada perkembangannya, demokrasi tidak bisa lagi dilaksanakan dalam ranah lokal secara langsung, dalam ranah nasional demokrasi idealnya dilakukan secara perwakilan demi kelancaran jalannya pemerintahan suatu negara, meskipun hal ini tidak dapat menghilangkan diskriminasi pada kaum minoritas yang namun kegiatan politik akan lebih efektif serta terencana dengan baik. Sementara sebagian besar rakyat hanya dapat puas jika kepentingannya terwakili, tetapi tidak memiliki kemampuan dan kesempatan yang sama untuk mengefektifkan hak-haknya sebagai warganegara (Soedarsih, 2009 : 52-54).

Pendidikan demokrasi diajarkan, agar dapat mencegah permasalahan-permasalahan demokrasi yang kini semakin banyak. Pendidikan demokrasi merupakan suatu bentuk penanaman prinsip dan nilai demokrasi

kepada generasi penerus bangsa dalam rangka mempersiapkan diri menjadi pribadi yang dapat berperilaku dan bertindak secara demokratis. Demokrasi tidak sekedar dari rakyat, oleh rakyat untuk rakyat atau keterlibatan langsung rakyat dalam mengambil keputusan politik. Demokrasi di dalamnya menyangkut kondisi yang kondusif untuk mensosialisasikan pendidikan nilai-nilai yang menjadi harapan oleh seluruh warga negara Indonesia. Oleh karena itu pendidikan demokrasi tidak hanya menunjuk pada suatu kondisi atas tatanan pemerintahan atau sistem yang sudah ada, namun pendidikan demokrasi juga harus mampu melakukan inovasi-inovasi yang baru untuk kemajuan demokrasi di Indonesia. Pendidikan demokrasi dalam arti lebih spesifik dapat diartikan sebagai usaha secara sadar untuk mengubah proses sosialisasi demokrasi dalam masyarakat sehingga mereka betul-betul memahami sistem demokrasi yang ideal dan hendal diwujudkan (Nasiwan, 2004 : 6)

Dalam UU No. 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional (Sisdiknas), dirumuskan terdapat dasar, fungsi dan tujuan pendidikan nasional. Pendidikan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (Pasal 2, UU No.20 / 2003). ). Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab (Pasal 3, UU No. 20 / 2003). Dari uraian UU No. 20 / 2003 makna dari kepribadian yang mantap dan mandiri serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan berbangsa, merupakan esensi dari pendidikan demokrasi.

Pendidikan demokrasi dijalankan atau dilaksanakan sejak dini, melalui dari lingkungan keluarga, sekolah dan masyarakat. Lingkungan keluarga merupakan lingkungan paling awal untuk pembelajaran pendidikan demokrasi, karena dari keluarga dapat diajarkan pendidikan demokrasi sejak dini. Seperti halnya saat mengutarakan pendapat kepada keluarga, dari situ dapat belajar adanya demokrasi. Disamping keluarga, sekolah juga dapat memberikan wadah dalam pembelajaran demokrasi, yang dimana para siswa sudah diajarkan arti penting pendidikan demokrasi. Salah satunya di SMAN 1 Kertosono yang pembelajarannya sudah rasional mengenai pendidikan demokrasi. Terbukti adanya pendidikan demokrasi pada intra maupun ekstra sekolah. Pada intra sekolah adanya pemilihan untuk ketua OSIS, adanya kotak saran bahkan sistem pengaduan langsung

pada guru BK, sedangkan pada ekstra adanya pemilihan masing-masing ketua ekstra. SMAN 1 Kertososno merupakan SMA favorit di Kabupaten Nganjuk, terletak di Jalan raya Surabaya-Madiun yang letaknya sangat strategis, berdekatan dengan terminal Kertososno yang kini sedang di rombak menjadi RSUD Kertososno.

Guru di SMA Negeri 1 Kertosono memberikan pembelajaran yang baik. Siswa dituntut untuk dapat berbicara mengungkapkan pendapatnya saat proses belajar mengajar di kelas. Seluruh mata pelajaran menekankan pada pembentukan sikap demokratis, sehingga siswa dapat lebih berani untuk menyampaikan pendapat, di dalam proses pembelajaran juga dimasukkan pendidikan demokrasi agar generasi muda ini dapat mengetahui dan mempelajari secara langsung bagaimana demokrasi di Indonesia. Pembelajaran di SMAN 1 Kertosono menekankan agar semua siswa bisa kritis dalam mengungkapkan pendapatnya ketika pembelajaran di kelas, maupun di luar kelas seperti saat ekstrakurikuler.

Sikap keteladanan guru yang selalu menghormati berbagai pendapat antar guru lain dan juga siswa, memiliki peranan dalam menciptakan ruang-ruang kelas yang demokratis, seperti aktifnya siswa saat pembelajaran di kelas. Siswa selaku warga kelas memiliki status dan kedudukan yang setara, tidak ada yang menguasai atau sebaliknya dikuasi. Pembelajaran di kelas tidak hanya menyajikan data dan informasi bagi siswa, tetapi juga mengembangkan proses pembelajaran dengan sistem transfer dan transformasi pada diri sendiri sehingga memperoleh sesuatu yang bisa meningkatkan potensi diri secara optimal. Di samping itu, kelas juga merupakan kehidupan masyarakat sipil itu sendiri, dimana setiap siswa memiliki kebebasan yang dibatasi oleh kebebasan siswa yang lain, sehingga memiliki prospek lebih baik untuk masa kehidupan berikutnya.

Pembelajaran yang berlangsung di kelas mendorong seluruh warga kelas senantiasa mempergunakan logika, *critical thinking*, dan refleksi. Guru dalam proses pembelajaran tidak hanya menyampaikan materi pembelajaran, tetapi guru juga memberikan contoh dan arti pentingnya keadilan dan kejujuran, seperti selalu menghormati pendapat siswa lain, memberikan kesempatan semua siswa untuk menyampaikan pendapatnya, serta tidak membedakan antar siswa, dan selalu berbicara dengan jujur. Bagaimana guru menegakkan keadilan dan kejujuran dalam pembelajaran merupakan awal bagi siswa memahami nilai-nilai demokrasi. Agar para siswa dapat tumbuh dan berkembang dalam alam demokrasi, mereka harus diberikan kesempatan untuk mengembangkan potensi diri di kelas yang memberikan pengalaman kehidupan dengan kerjasama, kebersamaan, saling percaya-mempercayai,

saling hormat-menghormati, saling menghargai, dan saling tolong-menolong.

Setiap guru harus memiliki strategi dalam melaksanakan pembelajaran yang demokratis. Pembelajaran merupakan interaksi antara guru dan siswa berkaitan dengan proses pemberian ilmu. Guru juga tidak boleh mengabaikan komunikasi yang telah dikembangkan dalam berinteraksi dengan para siswa, baik di ruang kelas pembelajaran maupun di luar kelas. Kaitan dengan ini, setiap guru menyadari nilai-nilai demokrasi yang telah disampaikan kepada para siswa, cara terbaik mengajarkan demokrasi adalah keteladanan yang diberikan guru di dalam kelas.

Di SMAN 1 Kertosono juga di ajarkan pendidikan demokrasi melalui intrakurikuler. Selain proses pembelajaran juga diterapkan pada kegiatan OSIS dan juga pembelajaran di dalam kelas. Namun masih banyak siswa yang belum bisa memahami demokrasi tersebut. Demokrasi merupakan bagian dari sila keempat Pancasila, yang dimana kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan ada di dalam demokrasi tersebut, dengan adanya pendidikan demokrasi ini maka wujud implementasi nilai-nilai Pancasila dapat diajarkan kepada siswa, agar siswa dapat lebih mengerti dan memahami bagaimana pendidikan demokrasi melalui nilai-nilai Pancasila.

Istilah demokrasi pada umumnya mengacu pada suatu sistem pemerintahan yang pengelolaannya dilakukan secara bersama-sama. Demokrasi berasal dari bahasa Yunani "*demos*" yang berarti rakyat, dan "*kratos / kratein*" yang berarti kekuasaan. Konsep dasar demokrasi adalah "*rakyat berkuasa*" (*government of rule by the people*). Demokrasi adalah pemerintahan oleh rakyat, kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat dan dijalankan langsung oleh mereka atau oleh wakil-wakil yang mereka pilih di bawah sistem pemerintahan bebas. Menurut Abraham Lincoln, demokrasi adalah *government of the people, by the people, for the people*, yakni "suatu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat." (Prayitno, 2009 : 4)

Dapat disimpulkan bahwa demokrasi merupakan suatu tatanan pemerintahan yang menitikberatkan kepada rakyat. Rakyat menjadi pemeran utama dalam sistem demokrasi ini, sehingga kepentingan rakyat menjadi prioritas utama dalam sistem pemerintahan. Rakyat memiliki hak dan kewajiban untuk melibatkan diri dalam sistem pemerintahan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Namun tidak cukup itu saja, demokrasi pada dasarnya juga merupakan seperangkat prinsip-prinsip dan gagasan tentang kebebasan. Kebebasan rakyat telah diatur dalam UUD NRI 1945, khususnya pada Bab XA tentang Hak Asasi Manusia pasal 28I (1) yang berbunyi :

“Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun”,

sehingga jelas bahwa kebebasan untuk rakyat merupakan kunci utama dalam kehidupan berdemokrasi.

Nilai-nilai demokrasi sesungguhnya merupakan nilai-nilai yang diperlukan untuk mengembangkan pemerintahan demokratis. Nilai-nilai demokrasi berfungsi sebagai pedoman dalam berperilaku maupun dalam hal mengambil keputusan pada suatu kegiatan ataupun perbuatan. Nilai-nilai demokrasi ini sangat diperlukan karena pada dasarnya negara kita merupakan Negara yang demokrasi dimana dimana musyawarah sangat diutamakan dalam rangka mencapai kata mufakat. Berdasarkan nilai atau kondisi inilah, sebuah pemerintahan demokratis dapat ditegakkan. Sebaliknya, tanpa kondisi ini pemerintahan tersebut akan sulit ditegakkan. Nilai-nilai demokrasi yang dimaksud antara lain adalah kebebasan (berpendapat, berkelompok, berpartisipasi), menghormati orang atau kelompok lain, kesetaraan, kerjasama, persaingan, dan kepercayaan.

Istilah pendidikan berasal dari kata *paedagogi*, dalam bahasa Yunani *pae* artinya anak dan *ego* artinya aku membimbing. Secara harfiah pendidikan berarti aku membimbing anak, sedangkan tugas pembimbing adalah membimbing anak agar menjadi dewasa. Maka pendidikan adalah suatu cara seorang pendidik dalam memberikan pengetahuan kepada anak didiknya. Pada dasarnya pendidikan di Indonesia sudah diatur di dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 31 ayat 1 yang berbunyi : “Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan”. Oleh karena itu baik orang tua, masyarakat dan pemerintah memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk mencerdaskan bangsa melalui pendidikan. Selain itu pemerintah secara tegas telah mencantumkan tanggung jawabnya dalam hal pendidikan pada Undang-Undang Dasar 1945 pasal 31 ayat 3 yang menyatakan bahwa pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketaqwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Pendidikan demokrasi merupakan suatu kegiatan seorang pendidik dalam membimbing peserta didik berdemokrasi dengan mensosialisasikan nilai-nilai demokrasi sehingga diharapkan dapat menciptakan perilaku yang demokratis. Ada dua hal yang harus ditekankan pada pendidikan demokrasi, yaitu demokrasi sebagai konsep dan demokrasi sebagai praksis. Demokrasi sebagai konsep, artinya demokrasi berbicara

mengenai arti, maka sikap perilaku yang tergolong demokratis. Sedangkan demokrasi sebagai praksis, artinya demokrasi sesungguhnya sudah menjadi sistem. Sebagai suatu sistem kinerja demokrasi terikat suatu peraturan main tertentu, apabila dalam sistem itu ada orang yang tidak mentaati aturan main yang telah disepakati bersama, maka aktifitas itu akan merusak demokrasi dan menjadi anti demokrasi (Sunarso dalam Kusrahmadi, 2004 : 3). Tugas seorang pendidik adalah mensosialisasikan dua tataran tersebut dalam konsep dan praksisnya, sehingga peserta didik memahami dan ikut terlibat dalam kehidupan demokrasi.

Pemahaman mengenai kehidupan demokrasi oleh peserta didik tak lepas dari adanya komitmen para elit politik, tokoh masyarakat, guru, dan seluruh masyarakat. Sosialisasi pendidikan demokrasi harus memperhatikan prinsip-prinsip antara lain :

“pendidikan demokrasi adalah suatu proses, pendekatan yang digunakan secara komprehensif. Pendidikan ini hendaknya dilakukan secara kondusif baik di lingkungan sekolah, rumah, dan masyarakat, semua partisipan dan komunitas terlibat di dalamnya. Pelatihan pendidikan demokrasi perlu diadakan bagi kepala sekolah, guru, murid, orang tua murid, dan komunitas pemimpin yang merupakan esensial utama. Perlu perhatian terhadap latar belakang murid yang terlibat dalam proses kehidupan demokrasi. perhatian demokrasi harus berlangsung cukup lama, dan pembelajaran demokrasi harus diintegrasikan dalam kurikulum secara praksis di sekolah dan masyarakat.” (Raharjo dalam Kusrahmadi, 2004 : 8)

Pendidikan demokrasi dalam arti luas dapat dilakukan baik secara informal, formal dan non formal. Pendidikan demokrasi pada hakikatnya adalah sosialisasi nilai-nilai demokrasi supaya bisa diterima dan dijalankan oleh warga negara. Didalam pendidikan demokrasi secara substantif menyangkut sosialisasi, diseminasi, aktualisasi dan implementasi sistem, nilai, konsep dan praktik demokrasi melalui pendidikan. pendidikan demokrasi bertujuan mempersiapkan warga negara berperilaku dan bertindak demokratis, melalui aktivitas menanamkan pada generasi muda akan pengetahuan, kesadran dan nilai-nilai demokrasi. (Sunarso dalam Kusrahmadi, 2004 : 5)

Bentuk pendidikan demokratis tersebut akan tumbuh dan kokoh jika di kalangan siswa tumbuh kultur dan nilai-nilai demokrasi antara lain toleransi, bebas mengemukakan dan menghormati perbedaan pendapat, memahami keanekaragaman dalam bermasyarakat, terbuka dalam berkomunikasi, menjunjung nilai dan martabat kemanusiaan, percaya diri atau tidak

mengantungkan diri pada orang lain, saling menghargai, mampu mengekang diri, kebersamaan, dan keseimbangan (Zamroni, 2011: 31-32). Dalam hal ini peneliti hanya menekankan pada penerapan budaya demokrasi di lingkungan sekolah, karena di sekolah pun semua persoalan hendaknya diselesaikan melalui musyawarah mufakat. Contoh persoalan sekolah yang bisa di musyawarahkan, antara lain: 1) diskusi kelas dalam penyusunan tata tertib sekolah, 2) pemilihan ketua kelas, 3) penyusunan regu piket kelas, 4) pemilihan ketua OSIS. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa peranan nilai-nilai demokrasi dalam bidang pendidikan adalah sebagai pedoman guru dan siswa untuk menciptakan keadilan dan kebersamaan.

Pada hakikatnya nilai adalah suatu sifat yang melekat pada benda atau suatu objek. Sesuatu objek dianggap memiliki nilai, bahwa di dalam objek tersebut melekat suatu ciri-ciri khusus. Nilai dianggap ada karena terdapat suatu kenyataan-kenyataan lain sebagai pembawa nilai. Definisi dari Wahana menjelaskan bahwa nilai merupakan suatu yang terkait dengan pengetahuan dan pengalaman manusia. Nilai tersebut merupakan nilai yang baik selaras dengan batin manusia. Namun nilai juga ada yang melampaui ukuran subjektif, dimana hal tersebut dipengaruhi oleh keselarasan aspirasi subjektif dengan apa yang dicintainya. Kepekaan manusia terhadap nilai sering dialami terlalu sempit sehingga tidak menjamin pemahaman serta penilaian objektif akan nilai tersebut.

Nilai-nilai dasar manusiawi merupakan nilai yang telah dimiliki oleh masing-masing manusia sesuai dengan kodratnya sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang sempurna yaitu memiliki akal dan pikiran. Manusia memiliki nilai intelektual, nilai religious, serta beberapa aspek kehidupan yang mengarah pada nilai-nilai kehidupan. Pada perumusan Pancasila secara material memuat nilai-nilai dasar manusiawi, yang merupakan nilai kodrat yang melekat pada setiap diri manusia. Menurut Notonagoro, manusia merupakan makhluk yang terdiri dari berbagai unsur serta aspek. Melihat dari susunannya manusia tersusun dari unsur jasmaniah maupun rohaniah, dalam sifatnya manusia memiliki sifat yang individual dan sekaligus sosial. (Wahana, 1993 : 73)

Pancasila mempunyai nilai-nilai pokok dalam kelima sila Pancasila. Sila pertama, Ketuhanan yang Maha Esa. Pada sila pertama menuntut setiap warga negara mengakui Tuhan Yang Maha Esa sebagai pencipta dan tujuan akhir, baik dalam hati dan tutur kata maupun dalam tingkah laku sehari-hari. Konsekuensinya adalah Pancasila menuntut umat beragama dan kepercayaan untuk hidup rukun walaupun berbeda keyakinan. Contoh nilai dalam kehidupan sehari-hari adalah saling menghormati antar umat beragama, tidak memaksa kehendak orang lain dalam memeluk agama, dan

menjalankan perintah agama sesuai dengan keyakinan masing-masing. Sila kedua, Kemanusiaan yang adil dan beradab. Pada sila kedua ini mengajak masyarakat untuk mengakui dan memperlakukan setiap orang sebagai sesama manusia yang memiliki martabat mulia serta hak-hak dan kewajiban asasi. Dengan kata lain, ada sikap untuk menjunjung tinggi martabat dan hak-hak asasinya atau bertindak adil dan beradab terhadapnya. Contoh nilai yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari yaitu : tidak membedakan agama, suku, ras, dan warna kulit, membela kebenaran dan keadilan, tidak menjalankan praktek diskriminatif.

Sila Ketiga, Persatuan Indonesia. Dengan menumbuhkan sikap masyarakat untuk mencintai tanah air, bangsa dan negara Indonesia, ikut memperjuangkan kepentingan-kepentingannya, dan mengambil sikap solider serta loyal terhadap sesama warga negara. Contoh nilai yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari yaitu : mementikan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi, cinta kepada tanah air, dan menjunjung tinggi persatuan bangsa. Sila keempat, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan. Pada sila ini bertujuan untuk mengajak masyarakat untuk bersikap peka dan ikut serta dalam kehidupan politik dan pemerintahan negara, paling tidak secara tidak langsung bersama sesama warga atas dasar persamaan tanggung jawab sesuai dengan kedudukan masing-masing. Nilai-nilai yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dapat ditunjukkan melalui perilaku seperti tidak memaksa kehendak orang lain, menghormati hasil musyawarah, dan ikut serta dalam menjunjung tinggi musyawarah mufakat. Sila kelima, Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pada sila ini dapat dilakukan dengan mengajak masyarakat aktif dalam memberikan sumbangan yang wajar sesuai dengan kemampuan dan kedudukan masing-masing kepada negara demi terwujudnya kesejahteraan umum, yaitu kesejahteraan lahir dan batin selengkap mungkin bagi seluruh rakyat. Nilai-nilai yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari yaitu melalui perilaku menghargai hasil karya orang lain, menghormati hak dan kewajiban orang lain, dan menjunjung tinggi keadilan.

Nilai-nilai pokok kelima sila Pancasila harus dihabituasikan dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya melalui kehidupan di sekolah, karena perkembangan siswa lebih banyak terjadi di rumah kemudian baru di sekolah. Mereka banyak didik mengenai makna sila-sila Pancasila yang harus diterapkan dalam kehidupannya. Di lingkungan sekolah para siswa selalu mempraktikkan yang ada dalam kandungan sila pertama sampai sila kelima. Terbukti bahwa setiap siswa saling menghormati meskipun berbeda keyakinan, tidak membedakan agama, suku,

maupun ras, cinta kepada tanah air yang setiap hari senin ikut serta melaksanakan upacara hari senin, menghormati hasil musyawarah apabila dilaksanakannya rapat OSIS, serta menghargai hasil karya orang lain dengan menjunjung tinggi keadilan.

Namun di lingkungan sekolah inilah siswa diajarkan selalu bisa menerapkan sila ke empat dengan baik, agar bisa sosialisasi di lingkungan masyarakat. Melalui pendidikan demokrasi di kelas maupun di luar kelas, siswa dapat mengerti apa pendidikan demokrasi. Memberikan peluang yang sama kepada siswa untuk bertanya atau berpendapat saat pembelajaran merupakan salah satu cara siswa untuk berani menyampaikan pendapatnya. Guru juga memberikan peraturan ketika melaksanakan pembelajaran, siswa harus menaati peraturan. Selain itu adanya kegiatan intra sekolah / OSIS dan kegiatan ekstrakurikuler juga dapat memupuk jiwa kesadarannya akan pentingnya demokrasi. Terbukti pada saat adanya pemilihan umum ketua/wakil ketua OSIS maupun ekstrakurikuler para siswa memberikan suaranya kepada calon yang mereka percayai untuk memimpin. Dari berbagai macam bentuk pembelajaran pendidikan demokrasi yang ada di sekolah maka implementasi nilai-nilai Pancasila akan masuk ke dalam diri siswa, dari sila pertama sampai dengan sila ke lima. Khususnya pada sila ke empat siswa dapat menjadikan kebiasaan mereka yang di lakukan di sekolah akan menjadi budaya demokrasi, karena siswa mendapatkan pelajaran demokrasi yang terus akan di dapatkannya.

## METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif, sedangkan metode yang digunakan pada penelitian ini menggunakan metode deskriptif. Melalui pendekatan ini akan diperoleh data dari SMAN 1 Kertosono yang dapat diolah menjadi kata-kata tertulis, sehingga hasil dari penelitian ini ditekankan untuk memberikan gambaran secara obyektif dan dibandingkan dengan teori yang ada dengan cara mendeskripsikan informasi sesuai dengan apa adanya.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif akan memusatkan perhatian pada masalah-masalah atau fenomena-fenomena yang ada pada saat penelitian atau masalah yang bersifat aktual, kemudian menggambarkan fakta tentang masalah yang diteliti diiringi dengan interpretasi rasional yang akurat, sehingga penelitian ini menggambarkan fakta dan menjelaskan mengenai strategi sekolah dalam menerapkan pendidikan demokrasi sebagai wujud implementasi nilai-nilai Pancasila berdasarkan fakta-fakta sebagaimana adanya dan mencoba menganalisis untuk memberi kebenarannya berdasarkan data yang diperoleh. Dalam membantu pelaksanaan penelitian maka

diperlukan penentuan fokus penelitian yang tepat sesuai dengan tujuan dan masalah penelitian agar penelitian yang dilakukan dapat terarah dan berhasil baik. Penelitian ini mengenai strategi sekolah dalam menerapkan pendidikan demokrasi sebagai wujud implementasi nilai-nilai Pancasila (studi pada SMAN 1 Kertosono).

Adapun rancangan penelitian dalam penelitian ini sebagai berikut, tahap persiapan, meliputi pembuatan proposal sesuai dengan judul yang telah di setujui, meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian yang terangkum dalam BAB I, kajian pustaka yang terangkum dalam BAB II, serta metode penelitian yang terangkum dalam BAB III. Tahap pembuatan instrument, permasalahan belum memiliki kejelasan dan kepastian sehingga yang menjadi instrument adalah peneliti sendiri. Setelah fokus penelitian sudah cukup jelas, akan dikembangkan instrument penelitian sederhana, yang diharapkan dapat melengkapi data dan membandingkan dengan data yang telah ditemukan melalui observasi dan wawancara. Tahap pengumpulan data, pada tahap ini data yang dikumpulkan dari informan melalui observasi, wawancara, serta dokumen. Tahap analisis data, setelah data terkumpul selanjutnya dilakukan analisis data. Untuk menganalisis data-data yang sudah didapatkan perlu dilakukan langkah-langkah, antara lain mengolah data, mereduksi data, menyajikan data, serta menulis hasil kesimpulan. Tahap pembuatan laporan, pada tahap ini akan dilakukan pembuatan laporan pada hasil analisis data, selain itu tahap proposal akan disempurnakan menjadi laporan skripsi yang didalamnya dilengkapi dengan hasil dan pembahasan terhadap rumusan masalah yang dikaji serta pembuatan simpulan dan saran.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini melibatkan beberapa strategi, seperti yang diuraikan sebagai berikut: teknik observasi merupakan observasi atau kegiatan pengamatan yang didalamnya peneliti langsung turun ke lapangan untuk mengamati perilaku dan aktivitas individu-individu yang dilakukan dilokasi penelitian. Observasi yang dilakukan pada penelitian ini untuk mencari data pendidikan demokrasi dengan meninjau secara langsung pada kegiatan belajar mengajar di kelas yang dilakukan Guru seperti adanya diskusi di kelas, serta kegiatan di luar kelas seperti kegiatan OSIS dan Ekstrakurikuler yang di lakukan oleh Pembina OSIS / Pembina Ekstrakurikuler dengan pengamatan dan pencatatan kepartisipasian dan keaktifan siswa, serta pendokumentasian kegiatan belajar mengajar, kegiatan ekstrakurikuler yang di lakukan oleh Guru. Dalam penelitian ini, metode wawancara yang digunakan adalah wawancara mendalam (*indepth interview*). Proses wawancara ini memerlukan pertanyaan yang secara umum tidak terstruktur (*unstructured*) dan bersifat

terbuka (*open-ended*) yang dirancang untuk memunculkan pandangan dan opini dari Kepala SMAN 1 Kertosono dan Guru serta Pembina OSIS maupun Pembina Ekstrakurikuler. Dokumentasi berfungsi sebagai pelengkap dari teknik wawancara maupun observasi. Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Hasil penelitian dari observasi atau wawancara, akan lebih kredibel atau dapat dipercaya jika didukung oleh sejarah pribadi kehidupan di masa kecil, di sekolah, di masyarakat, di tempat kerja, dan autobiografi.

Teknik analisis data adalah cara atau analisa yang digunakan untuk mengolah data yang diperoleh dari hasil penelitian di lapangan, merupakan proses berkelanjutan yang membutuhkan refleksi terus menerus terhadap data, mengajukan pertanyaan-pertanyaan analitis, dan menulis catatan singkat sepanjang penelitian. Untuk menganalisis data-data yang sudah didapatkan perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut : mengolah data, proses ini melibatkan transkripsi wawancara terhadap informan, men-scanning materi, mengetik data lapangan, atau memilah-milah dan menyusun data hasil wawancara informan. Mereduksi data, berarti merangkum berbagai hasil wawancara dari informan, memilih hal-hal yang pokok mengenai strategi dalam menerapkan pendidikan demokrasi, memfokuskan pada hal-hal yang penting mengenai faktor pendukung dan penghambat serta solusinya. Menyajikan data, data yang dimaksud disini adalah hasil dari mereduksi data yang hasilnya di olah menggunakan penelitian kualitatif dan penyajian datanya menggunakan teks yang bersifat narasi. Menulis hasil kesimpulan, setelah dilakukan penyajian data maka langkah selanjutnya adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Hasil Penelitian**

Berdasarkan hasil yang telah dilakukan dalam penelitian, maka diperoleh gambaran mengenai strategi penerapan pendidikan demokrasi sebagai wujud implementasi nilai-nilai Pancasila di SMAN 1 Kertosono pada umumnya melalui penerapan budaya demokrasi. Disebut sebagai budaya demokrasi, karena beberapa kegiatan atau program yang dibuat oleh sekolah sudah layak disebut sebagai suatu kebiasaan yang dilakukan berulang-ulang sehingga dapat mengarahkan pada siswa untuk bersikap demokrasi dan mengarahkan siswa untuk bersikap demokrasi dan mengarahkan siswa untuk menjalankan kehidupan sehari-hari sesuai dengan nilai-nilai demokrasi. Kebiasaan yang dilakukan secara berulang-ulang dan mengarah pada nilai-nilai demokrasi itulah yang disebut dengan budaya demokrasi. Selain

melalui budaya demokrasi, Kepala Sekolah juga menuturkan bahwa pelajaran PPKn ikut berperan penting dalam mengenalkan pendidikan demokrasi pada siswa. Budaya demokrasi yang terdapat di SMAN 1 Kertosono ini ada tiga macam, yaitu kotak saran, kepuasan pelanggan, dan kegiatan pemilu yang diselenggarakan oleh pengurus OSIS.

Wujud budaya demokrasi di SMAN 1 Kertosono adalah (a) Kotak saran, kotak saran yang terdapat di SMAN 1 Kertosono merupakan salah satu budaya demokrasi yang bertujuan untuk menerapkan pendidikan demokrasi pada siswa. Berikut adalah pernyataan dari Kepala SMAN 1 Kertosono, Samidi, M.Pd ketika wawancara:

“budaya demokrasi di sini antara lain kotak saran itu, apabila anak-anak tidak mengisi kotak saran, mereka juga langsung memberikan keluhan nya pada BK yang biasanya di sebut kepuasan pelanggan/pengaduan ke BK, kemudian dari OSIS ada kegiatan pemilu secara langsung”

Adanya kotak saran ini di sebut dengan budaya demokrasi, karena melalui kotak saran ini siswa dapat menyalurkan aspirasinya mengenai sekolah. Kotak saran ini sudah lama diberlakukan di sekolah. Siswa dan para guru juga membenarkan akan hal itu, bahwa budaya demokrasi di SMAN 1 Kertosono melalui kotak saran keberadaannya memang sudah cukup lama. Tempat kotak saran ada 2, yakni di depan ruang guru dan di depan ruang BK. Pihak sekolah sudah lama menaruh kotak saran itu agar bisa di jadikan sarana siswa untuk menyampaikan keluhannya terhadap sekolah maupun guru pengajar siswa. Seperti yang dituturkan oleh Bapak Wahyudi selaku guru BK SMAN 1 Kertosono, sebagai berikut:

“kotak saran itu berada di depan ruang guru dan ruang BK mbak, itu adalah salah satu sarana siswa untuk bisa menyampaikan pendapat maupun keluhannya terhadap pihak sekolah/pengajarnya/sarana prasarana di SMAN 1 Kertosono”

Pada saat MOS di SMAN 1 Kertosono para siswa baru diberikan pengarahan mengenai saran atau kritik yang bisa diberikan kepada sekolah melalui kotak saran yang berada di depan ruang guru. Melalui sosialisasi saat MOS di himbau para siswa agar tak perlu takut untuk menyampaikan pendapatnya, karena saat menuliskan saran tersebut siswa harus menuliskan nama dan kelasnya. Awal yang baik untuk menjadi kebiasaan para siswa melatih kejujuran dan keberaniannya menyampaikan pendapat maupun kritik terhadap sekolah. Hasil yang diperoleh sekolah melalui adanya kotak saran cukup membantu pihak sekolah agar bisa menerima kritik atau saran dari siswa, sehingga siswa tidak ada rasa takut

untuk menyampaikan pendapatnya terhadap sekolah. Pendapat yang diberikan siswa kepada sekolah akan disaring melalui BK sebagai penanggung jawab terhadap apa yang disampaikan siswa terhadap pihak sekolah dan akan di diskusikan untuk perkembangan sekolah maupun kekurangan sekolah. Seperti contoh adalah saran dari siswa baru yang menuliskan mengenai tidak rapinya parkir siswa yang berada di deretan samping kelas X, agar bisa di rapikan lagi sehingga apabila siswa yang akan parkir di lapangan belakang bisa lewat dengan lancar. (b) Pengaduan ke BK/kepuasan pelanggan, diberlakukan sejak tahun 2005 di SMAN 1 Kertosono dan telah dilakukan secara rutin setiap satu semester sekali, sehingga sudah disebut dengan kebiasaan. Pada kepuasan pelanggan ini dibuat untuk menampung keluhan atau penilaian terhadap layanan sekolah serta harapan maupun saran untuk sekolah, baik dari siswa maupun wali murid. Ada dua macam kepuasan pelanggan di sekolah ini, yang pertama kepuasan pelanggan yang penilaiannya dengan menyebarkan angket atau kuisioner, yang kedua kepuasan pelanggan yang dapat disampaikan secara langsung baik melalui lisan, telepon, maupun sms kepada pihak sekolah yang kemudian dicatat dalam buku besar. Melalui di sebarannya angket pada siswa akan dapat membantu pihak sekolah dalam mengelola sekolah, karena apabila disebar angket di setiap kelas maka semua siswa bisa mengisi dan memberikan kritik maupun pendapatnya terhadap kinerja di sekolahnya. Berikut adalah pernyataan dari Bapak Samidi ketika wawancara:

“kepuasan pelanggan merupakan dimana warga sekolah jika mengalami sebuah ketidakpuasan di dalam penggunaan apa saja yang ada di SMAN 1 Kertosono dapat diketahui. Jadi ketidakpuasan tersebut haruslah diutarakan, dan bersifat transparan. Kepuasan pelanggan terdiri dari dua kategori yang pertama berupa angket, angket tersebut kita berikan pada siswa setiap satu semester sekali, begitupun kepada wali murid. Yang kedua kepuasan pelanggan ditujukan kepada seluruh warga sekolah beserta wali murid, yang mereka dapat langsung mengutarakan pendapatnya apabila tidak bisa menahan sampai enam bulan, mereka dapat menyampaikan keluhannya yang ditujukan kepada siapapun, akan ditulis di buku seperti dengan pembukuan.”

Adanya kepuasan pelanggan adalah untuk memudahkan siswa beserta wali siswa untuk langsung bisa menyampaikan saran maupun kritikan kepada pihak sekolah serta berbagai macam pengaduan lainnya. Terkadang ada wali siswa yang mengadakan mengenai anak mereka, bahwa anaknya sangat bandel seperti saat pagi mereka berpamitan untuk berangkat ke sekolah

namun tak sampai ke sekolah dan membolos bersama teman-temannya. Maka tugas guru BK yang menjadi penanggung jawab untuk menampung segala keluhan dari pihak wali siswa maupun siswa. Penuturan yang sama juga di sampaikan oleh Bapak Wahyudi selaku guru BK SMAN 1 Kertosono ketika wawancara:

“disini keluhan dari siswa/wali siswa kita tamping mbak, jadi mereka dapat secara langsung memberikan keluhan atau saran untuk evaluasi di SMAN 1 Kertosono seperti contoh ada wali siswa ke sekolah untuk menyampaikan keluhannya mengenai biaya spp yang meminta ijin untuk menunggak sementara karena pihak wali sedang mengalami musibah/wali siswa siswa menanyakan bagaimana perkembangan anaknya di sekolah apakah selalu masuk mengikuti pelajaran atau justru membolos sekolah, sehingga kita dari pihak sekolah akan membenahi kekurangan yang ada di sekolah atas berbagai pertimbangan dan tentunya di rapatkan terlebih dahulu dengan guru beserta Kepala Sekolah.”

Tak hanya wali siswa yang mendatangi ruang BK untuk mengadakan keluhannya, namun siswa pun juga tak kalah antusias menyampaikan keluhannya maupun saran dan kritikan untuk sekolah. Seperti adanya siswa yang mengeluh atau bercerita pada guru BK mengenai masalah kelanjutan setelah lulus SMA, apakah mereka bisa kuliah dengan secara gratis, karena di sisi lain ekonomi keluarganya kurang mampu untuk membiayai kuliah. Berikut penuturan Bapak Wahyudi selaku guru BK SMAN 1 Kertosono ketika wawancara:

“terkadang siswa juga ada yang bercerita mengenai keadaan ekonomi keluarganya mbak, meeka ingin melanjutkan kuliah namun orang tua tidak bisa membiayai. Semangat mereka untuk melanjutkan pendidikan lagi sangat besar, maka kami para guru BK sebisa mungkin akan membantunya, seperti memberikan informasi mengenai bidik misi yang dimana siswa tidak akan membayar kuliah namun akan dibiayai oleh pemerintah.”

Setiap masuk tahun ajaran baru siswa diberikan angket mengenai pembelajaran yang sudah mereka lakukan, yang di dalamnya berupa bagaimana cara mengajar guru, kritik dan saran mengenai sarana dan prasarana yang ada di sekolah serta masukan untuk sekolah agar bisa lebih maju kedepannya. Siswa diwajibkan menulis saran maupun kritikan tersebut dan di kumpulkan lagi kepada guru BK. Tulisan siswa tersebut akan di saring oleh guru BK dan akan di diskusikan mengenai berbagai saran maupun kritikan siswa yang di berikan terhadap pihak sekolah. (c) Kegiatan pemilu ketua dan wakil ketua OSIS, kegiatan pemilu ini sudah menjadi budaya demokrasi di SMAN 1 Kertosono,

terbukti bahwa setiap tahunnya melakukan kegiatan pemilu Ketua OSIS secara rutin. Pemilihan tersebut dilakukan dengan menggunakan Pemilu secara langsung, atau dapat disebut sebagai pemilu saat memilih presiden dan wakil presiden. Pada saat menjelang pemilu Ketua OSIS para calon Ketua dan Wakil Ketua OSIS melaksanakan kampanye di semua kelas dengan memberikan visi dan misinya. Namun tidak hanya kampanye di kelas-kelas saja melainkan kampanye di lapangan basket yang dilakukan setelah selesainya upacara Bendera hari Senin, sehingga seluruh siswa dan guru dapat langsung mendengarkan visi misi para kandidat tersebut. Berikut adalah penuturan dari Raditya selaku ketua OSIS SMAN 1 Kertosono ketika wawancara:

“sebenarnya pemilihan ketua OSIS dengan cara menggunakan hak suaranya secara langsung sudah turun temurun sejak dulu mbak, saya tidak tahu tepatnya kapan, namun kami sebagai adek-adek tingkat dari senior OSIS melanjutkan dengan kegiatan ini. Dengan adanya sistem pemilu seperti ini semua siswa dan guru dapat menggunakan hak pilihnya masing-masing.”

Tahap dalam penyelenggaraan Pemilu, yaitu dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi. Berikut adalah penuturan dari Raditya selaku ketua OSIS SMAN 1 Kertosono, ketika wawancara:

“ya saat perencanaan kita mengawasi para calon kandidatnya dari tingkah laku sehari-hari, ketika sudah maka kita melakukan tes mempersempit calon kandidat yang sebelumnya ada 10 siswa kini menjadi 6 siswa untuk berpasangan ketua atau wakil ketua. Kita pelaksanaan dilakukan para kandidat duduk di kursi yang sudah disediakan oleh panitia, seluruh warga sekolah mengikuti kegiatan pemilu tersebut dengan cara mencontong salah satu foto kandidat ketua atau wakil ketua OSIS. Pada pengawasannya terdapat tim keamanan yang bertugas untuk mengawasi jalannya pemilu ketua atau wakil ketua OSIS. Ketika kegiatan selesai seluruh panitia pemilihan di kumpulkan di dalam ruangan tertentu untuk melakukan evaluasi, dari kekurangannya ketika kegiatan berlangsung, maupun kelebihanannya.”

Seluruh anggota OSIS mendapatkan kesempatan yang sama untuk bisa mengikuti tes sebagai calon kandidat ketua atau wakil ketua OSIS. Dari diadakannya tes itu akan di saring lebih sempit lagi, sehingga akan lebih mudah untuk mendapatkan calon kandidat ketua dan wakil ketua OSIS. Bukan hanya tes tulis saja, namun tes bakat pun juga ada, sehingga para calon kandidat mempunyai bakat yang berbeda-beda serta penilaian sehari-hari saat para calon kandidat di sekolah. Pada

saat pemilihan ketua dan wakil ketua OSIS di laksanakan antusias seluruh warga sekolah terbukti dengan mereka semua menuju tempat pemilihan suara tanpa terkecuali. Seluruh warga sekolah turut berpartisipasi dalam berjalannya pemilu ketua dan wakil ketua OSIS SMAN 1 Kertosono. Terbukti bukan hanya siswa saja yang ikut menyampaikan hak pilihnya, namun guru-guru SMAN 1 Kertosono juga ikut menyampaikan hak pilihnya. Tak hanya dengan adanya kotak saran, kepuasan pelanggan serta adanya pemilihan ketua dan wakil ketua OSIS yang menjadi strategi dalam menerapkan pendidikan demokrasi di SMAN 1 Kertosono namun melalui semua pembelajaran di kelas bisa di jadikan tempat untuk menerapkan pendidikan demokrasi tersebut. Seperti pelajaran PPKn sangatlah penting, tentunya memiliki peran penting dalam pengenalan pendidikan demokrasi. Namun bukan hanya pelajaran PPKn saja yang penting, tetapi semua pelajaran yang ada di SMAN 1 Kertosono.

Dalam pelajaran PPKn di sajikan materi mengenai nilai-nilai demokrasi, budaya demokrasi, serta pendidikan demokrasi, sehingga siswa dapat lebih mudah mempelajari pendidikan demokrasi dari pelajaran PPKn. Guru PPKn SMAN 1 Kertosono juga memiliki strategi tersendiri dalam menerapkan pendidikan demokrasi kepada siswa. Guru PPKn sebagai tenaga pendidik yang faham benar tentang demokrasi, sehingga mereka harus menjadi panutan yang cocok bagi siswa untuk memegang pendidikan demokrasi bahkan mampu memiliki strategi tersendiri untuk menerapkan pendidikan demokrasi pada siswa. Strategi guru PPKn dalam menerapkan pendidikan demokrasi pada siswa dilakukan saat proses belajar mengajar di dalam kelas, dengan metode diskusi dalam pembelajaran. Metode diskusi digunakan sebagai salah satu strategi untuk menerapkan pendidikan demokrasi pada siswa, karena dengan adanya diskusi siswa akan belajar untuk mengemukakan pendapatnya, menghargai perbedaan pendapat. Berikut penuturan dari Bu Wiwin selaku guru PPKn SMAN 1 Kertosono, ketika wawancara:

“strategi pada saat pembelajaran di dalam kelas saya menggunakan metode diskusi mbak. Karena dengan mengajak anak berdiskusi guru mempunyai sikap demokratis, guru tidak menguasai kelas sendirian tetapi siswa juga diberi kesempatan untuk menyampaikan pendapat, dengan adanya diskusi itu akan memicu keberanian siswa untuk berpendapat dan saling menghargai perbedaan pendapat, berani bertanya, tetapi masih berpegang teguh pada etika kepribadian yang bagus dan tidak sombong.”

Berdasarkan hasil observasi kegiatan belajar mengajar di kelas pada pelajaran PPKn tanggal 3 Juni 2016, guru memberikan pengarahan untuk metode

pembelajaran di kelasnya dengan detail agar siswa dapat memahaminya, ketika pembelajaran PPKn siswa belajar di dalam kelas menggunakan metode diskusi bersama teman atau kelompok belajarnya. Awalnya menggunakan metode diskusi siswa saat mengikuti pelajaran masih belum bisa menyesuaikan diri, para siswa masih cenderung ramai dan kurang memperhatikan teman atau kelompok lain yang sedang menyampaikan pendapatnya. Guru tidak diam begitu saja melihat para siswa ada yang ramai, guru memberikan arahan agar siswa dapat memahami metode diskusi. Melalui metode diskusi itu, guru memberikan materi maupun pertanyaan untuk masing-masing kelompok yang akan di diskusikan kepada seluruh siswa. Jadi dengan adanya metode diskusi ini, siswa akan berbicara mengenai pendapatnya dan siswa yang lainnya akan belajar menghargai pendapat orang lain.

Strategi yang dilakukan untuk mencapai sebuah tujuan tidaklah semulus dengan apa yang diharapkan, namun terdapat faktor penghambat maupun pendukungnya. Berdasarkan hasil observasi di lapangan menunjukkan bahwa sosialisasi mengenai beberapa budaya demokrasi yang ada masih tergolong minim. Siswa masih kurang berani untuk mengutarakan pendapatnya, jiwa tanggung jawabnya masih kurang sehingga mereka tidak sadar akan kewajibannya sebagai siswa yang aktif. Kurangnya tanggung jawab dan keberanian siswa juga menjadi faktor penghambat untuk memperlancar pemilu ketua / wakil ketua OSIS, disimpulkan bahwa terdapat faktor penghambat yang terjadi pada diri siswa, yaitu adanya kurang rasa percaya diri dan keberanian siswa yang kurang. Tidak hanya itu saja, hambatan yang terjadi juga terdapat di dalam kelas yaitu saat berlangsungnya proses pembelajaran.

Berikut adalah faktor penghambat dan pendukung ketika menjalankan strategi untuk menerapkan pendidikan demokrasi sebagai wujud implementasi nilai-nilai Pancasila di SMAN 1 Kertosono. Beberapa faktor penghambat di antara lain adalah : (1) Ketidak beranian siswa menyampaikan pendapat maupun kritikan. (2) Kurangnya rasa percaya diri. (3) Mengundurkan diri dari tes pemilihan kandidat calon ketua / wakil ketua OSIS. (4) Merasa takut untuk berorasi. (5) Pihak sekolah merasa bingung dengan adanya banyak keluhan pada siswa dan wali siswa yang mengadu di BK sehingga sulit untuk memprioritaskan keluhan mereka. (6) Kurangnya fasilitas yang mendukung untuk menyampaikan pendapat pada sekolah.

Munculnya beberapa faktor penghambat adalah masa peralihan dari masa SMP ke SMA, karena pada masa SMP siswa cenderung acuh tak acuh pada setiap kegiatan yang berada di sekolah. Dari masa peralihan tersebut siswa akan menyesuaikan diri dengan lingkungan yang

baru serta peraturan yang baru dari sekolah sebelumnya. Pihak sekolah akan terus berusaha semaksimal mungkin agar siswa dapat menerima kebiasaan yang diberikan oleh pihak sekolah, karena yang bisa merubah kebiasaan yang tidak baik itu adalah siswa itu sendiri, mereka juga berniat dan berusaha agar bisa menjadi siswa yang lebih aktif dan bertanggung jawab, serta mengerti akan kewajibannya sebagai siswa yaitu berperan aktif pada pembelajaran maupun di luar pembelajaran kelas.

Semua masalah dalam pembelajaran tidaklah dijadikan beban yang berat oleh pihak sekolah, karena pihak sekolah akan bersama-sama memecahkan hambatan tersebut dan mencari solusi yang tepat untuk menangani masalah yang ada di sekolah. Tak hanya hambatan yang ada di sekolah, bahkan faktor pendukung juga ada untuk mendukung pelaksanaan strategi sekolah dalam menerapkan pendidikan demokrasi di SMAN 1 Kertosono, di antaranya adalah : (1) motivasi. (2) memberikan kebebasan siswa untuk berpendapat. (3) sosialisasi yang berulang-ulang. (4) membuat fasilitas yang mendukung untuk menjadikan tempat menyampaikan pendapat kritikan pada siswa / wali siswa. (5) membuat beberapa kriteria pengaduan siswa / wali siswa, dan mempertimbangkan yang penting.

Solusi yang dilakukan dalam mengatasi hambatan ketika melaksanakan strategi untuk menerapkan pendidikan demokrasi di sekolah, diantaranya melalui : diperbanyak adanya kotak saran di setiap lorong kelas X, XI, dan XII, memberikan motivasi pada siswa saat akan melakukan kegiatan pemilihan ketua OSIS dan wakil ketua OSIS, kepuasan pelanggan, serta metode pembelajaran di kelas yang di lakukan melalui diskusi.

## **Pembahasan**

Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan strategi yang digunakan untuk menerapkan pendidikan demokrasi sebagai wujud implementasi nilai-nilai Pancasila di SMAN 1 Kertosono. Pendidikan demokrasi dapat diajarkan, agar dapat mencegah permasalahan-permasalahan demokrasi yang kini semakin banyak. Pendidikan demokrasi merupakan suatu bentuk penanaman prinsip dan nilai demokrasi kepada generasi penerus bangsa dalam rangka mempersiapkan diri menjadi pribadi yang dapat berperilaku dan bertindak secara demokratis. Demokrasi tidak sekedar dari rakyat, oleh rakyat untuk rakyat atau keterlibatan langsung rakyat dalam mengambil keputusan politik. Demokrasi di dalamnya menyangkut kondisi yang kondusif untuk mensosialisasikan pendidikan nilai-nilai yang menjadi harapan oleh seluruh warga negara Indonesia. Oleh karena itu pendidikan demokrasi tidak hanya menunjuk pada suatu kondisi atas tatanan pemerintahan atau sistem

yang sudah ada, namun pendidikan demokrasi juga harus mampu melakukan inovasi-inovasi yang baru untuk kemajuan demokrasi di Indonesia. Pendidikan demokrasi dalam arti lebih spesifik dapat diartikan sebagai usaha secara sadar untuk mengubah proses sosialisasi demokrasi dalam masyarakat sehingga mereka betul-betul memahami sistem demokrasi yang ideal dan hendal diwujudkan (Nasiwan, 2004 : 6)

Pendidikan Kewarganegaraan atau *civic education* merupakan salah satu pembelajaran yang harus ada dalam setiap sekolah, karena akan berguna sebagai pembekalan siswa mengenai makna demokrasi sesuai dengan sistem pemerintahan Negara yang menganut sistem demokrasi (Branson, 2003:81). SMAN 1 Kertosono merupakan salah satu sekolah yang juga mengajarkan Pendidikan Kewarganegaraan pada peserta didiknya. Selain melalui pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan, sekolah ini juga memiliki strategi yang di gunakan untuk menerapkan pendidikan demokrasi pada siswa.

*Pertama*, adanya kotak saran yang berguna untuk menampung semua aspirasi atau saran bahkan keluhan dari seluruh warga sekolah. Kotak saran menjadi tempat untuk keterbukaan dalam menyampaikan saran atau keluhan, sehingga pihak sekolah dapat lebih mudah mengetahui apa yang diinginkan oleh warga sekolahnya. Adanya keterbukaan yang di berikan oleh kotak saran, maka akan dapat melatih keberanian, kejujuran, serta tanggung jawab kepada siswa. Pada saat pengisian kotak saran diharapkan siswa mengisi nama serta kelasnya, dari hal ini maka siswa akan belajar bertanggung jawab untuk apa yang ingin di sampaikan kepada pihak sekolah, entah itu berupa saran ataupun keluhan yang mereka alami. Dengan adanya keterbukaan seperti itu maka pihak sekolah untuk selalu sedia menerima masukan-masukan dari warga sekolah.

*Kedua*, dilaksanakannya kegiatan pemilihan ketua atau wakil ketua OSIS. Kebebasan berpartisipasi pada dasarnya adalah gabungan dari kebebasan berpendapat dan kebebasan berkelompok. Jenis partisipasi yang utama terdapat dalam Negara demokrasi yakni pemberian hak suara dalam pemilihan umum, anggota DPR, maupun presiden (Chamim, 2003:88). Pemilu yang dilaksanakan di SMAN 1 Kertosono merupakan pemilihan ketua dan wakil ketua OSIS, yang dilaksanakan setiap satu tahun sekali. Melalui kegiatan pemilu seperti ini diharapkan siswa dapat belajar berdemokrasi dengan baik. Siswa mempunyai hak dan kewajiban untuk memilih ketua atau wakil ketua OSIS dengan suara hati mereka masing-masing, karena pilihannya itu akan menentukan bagaimana kinerja pengerus OSIS ke depannya. Tak ada paksaan dalam pemilihan ketua atau wakil ketua OSIS, semua hasik suara dari nurani memilih. Sedangkan untuk pengurus OSISnya mereka dapat belajar menangani

pemilu secara langsung, yang kelak mereka akan terjun ke masyarakat dapat menyelenggarakannya dengan baik.

*Ketiga*, melalui kepuasan pelanggan yang diberikan kepada siswa dan wali murid. Siswa mempunyai kesempatan untuk menyampaikan saran atau kritikan kepada sekolah secara langsung tanpa harus menunggu akhir semester tiba. Mereka dapat menyampaikannya pada guru BK atau langsung datang ke ruang BK apabila mempunyai masalah atau keluhan. Sedangkan wali murid pun sama, mereka mempunyai hak yang sama seperti siswa. Wali murid dapat menyampaikan saran atau keluhan secara langsung dengan mendatangi sekolah dan melaporkan ke BK, atau dengan telepon langsung, serta mengirimkan SMS pada pihak sekolah. Dari pengaduan siswa maupun wali murid, guru mencatat pengaduan tersebut di buku besar, untuk di rapatkan bersama Kepala Sekolah dan guru lainnya untuk penanganan kritik tersebut.

*Kekempat*, salah satunya adalah pembelajaran di kelas yang menggunakan metode diskusi. Guru menggunakan metode diskusi sebagai pembelajaran untuk berdemokrasi. Pelaksanaan pembelajaran mengatakan bahwa tercapainya misi pendidikan sangat bergantung pada kemampuan guru untuk menanamkan demokrasi pada siswa (Rosyada, 2001:19). Dari adanya keterkaitan tersebut, maka guru PKn juga ikut berpartisipasi dalam menerapkan pendidikan demokrasi ketika mengajar di kelas. Guru PKn berperan dalam penyajian materi yang di berikan kepada siswa dan menjadi penengah ketika diskusi dilaksanakan. Adanya diskusi dapat mengajarkan siswa untuk untuk berperan aktif dalam proses pembelajaran, siswa mempunyai keberanian untuk menyampaikan pendapat di depan umum, serta siswa akan saling menghargai apabila terjadi perbedaan pendapat.

Berdasarkan strategi yang dipaparkan, akan berjalan dengan baik jika struktur menjalankan fungsinya masing-masing. Berhubungan dengan teori fungsionalisme structural milik Talcott Parsons terdapat persyaratan yang harus ada supaya masyarakat dapat berfungsi. Keempat persyaratan itu terdiri dari *Adaption, Goal Attainment, Integration*, dan *Latency* (Ritzer, 2008:121). Begitupun yang terjadi di masyarakat dalam lokasi tertentu, akan berjalan dengan baik seperti halnya strategi yang ada di SMAN 1 Kertosono. Jika semua struktur yang di mulai dari Kepala Sekolah, Waka, Guru atau karyawan, serta pengurus OSIS dan siswa dapat berjalan dengan fungsinya masing-masing maka strategi yang ada di SMAN 1 Kertosono akan berjalan dengan baik.

Dari teori fungsional yang di singkat dengan AGIL terdiri dari empat konsep, yaitu *adaptation* merupakan aspek sosial, *goal attainment* merupakan aspek ekonomi, *integration* aspek politik, serta *latency* merupakan aspek

budaya. Pada agenda kegiatan sosialisasi di sekolah dalam aspek sosial atau demokrasi dapat ditunjukkan oleh pengurus OSIS, yang apabila sebelum melaksanakan kegiatan pemilihan ketua atau wakil ketua OSIS di adakan orasi atau kampanye terlebih dahulu yang bertujuan untuk mengenalkan para kandidat ketua atau wakil ketua OSIS kepada seluruh warga sekolah. Bukan hanya sosialisasi saja apabila kegiatan pemilu dapat berjalan dengan lancar, namun perlu biaya juga agar kegiatan dapat terlaksana. Kegiatan tersebut merupakan kegiatan demokrasi yang cenderung focus kepada aspek politik dan akan menjadi sebuah budaya di sekolah apabila dilaksanakan sebagai kebiasaan serta secara berulang-ulang.

Keempat point-poin tersebut adalah strategi sekolah dalam menerapkan pendidikan demokrasi sebagai wujud implementasi nilai-nilai Pancasila pada siswa SMAN 1 Kertosono, berikut adalah analisis dari konsep AGIL : *Adaptation* (sosial). Keberlangsungan strategi agar dapat berjalan dengan baik adalah diadakannya sosialisasi. Adanya sosialisasi akan lebih mudah menunjang strategi yang akan di terapkan kepada siswa. Dengan melakukan sosialisasi kepada siswa mengenai adanya kotak saran maka diharapkan siswa akan lebih aktif untuk mengisi kotak saran tersebut. Tak luput dari kotak saran, pihak sekolah juga mensosialisasikan mengenai kepuasan pelanggan. Kepuasan pelanggan inilah para siswa dan wali murid dapat menyampaikan berbagai macam pendapat maupun kritikan untuk pihak sekolah ataupun mengenai fasilitas sekolah. Sedangkan melalui kotak saran siswa juga dapat menyampaikan saran ataupun kritikan secara berani dan bertanggung jawab, seperti menuliskan nama dan kelas mereka. Kotak saran juga sangat membantu untuk pihak sekolah, agar dapat mengetahui kekurangan dalam pelaksanaan di sekolah. Namun siswa masih ada yang kurang bertanggung jawab untuk menuliskan nama dan kelasnya, sepertinya mereka masih belum mempunyai keberanian, dari kejadian itu pihak sekolah selalu memberikan sosialisasi atau pengarahan mengenai pentingnya kotak saran dan kepuasan pelanggan. Bukan hanya itu saja, pada saat ada pemilihan ketua dan wakil ketua OSIS maka diadakan orasi oleh para kandidat. Orasi tersebut sebagian dari sosialisasi dari para kandidat yang bertujuan untuk mengenalkan diri mereka kepada seluruh warga sekolah, bagaimana visi misinya agar menjadikan kepengurusan OSIS lebih maju untuk kedepannya. Sedangkan dalam proses pembelajaran, guru menggunakan media diskusi agar guru dan siswa dapat beradaptasi dan menyesuaikan diri satu sama lain, sehingga guru dapat menerapkan pendidikan demokrasi melalui pembelajaran di dalam kelas. Perlu adanya aspek sosial di dalam strategi agar dapat mencapai tujuan. Aspek sosial tersebut diawali dari

adanya sosialisasi dari masing-masing struktur yang ada di dalam sekolah, maupun warga sekolah yang saling beradaptasi dan menyesuaikan diri dengan struktur serta lingkungan sekolah yang ada.

*Goal attainment* (ekonomi). Pada strategi yang telah di laksanakan oleh sekolah sebagai cara untuk menerapkan pendidikan demokrasi maka akan di tunjang aspek ekonomi agar dapat berjalan dengan baik. Dengan adanya ekonomi akan menunjang keberlangsungan budaya demokrasi di SMAN 1 Kertosono. Aspek ekonomi sangat penting pada kepuasan pelanggan. Seperti adanya keluhan dari siswa maupun wali murid mengenai sarana atau fasilitas sekolah, yang dimana sarana tersebut sangat di butuhkan untuk menunjang sekolah agar dapat lebih maju lagi. Bukan hanya mengenai sarana atau fasilitas sekolah, namun adanya wali murid yang mengadukan keluhannya untuk meminta keringanan membayar SPP maupun uang gedung. Pihak sekolah pun menyaring semua keluhan yang ada dan mempertimbangkan yang patut untuk di prioritaskan. Sama seperti kotak saran, yang isinya adalah saran maupun kritik untuk pihak sekolah agar dapat membenahi menjadi lebih baik lagi. Bukan hanya kepuasan pelanggan atau kotak saran, namun kegiatan pemilihan ketua atau wakil ketua OSIS juga memerlukan dana atau berpengaruh pada aspek ekonomi. Terbukti bahwa pengurus OSIS mendapatkan anggaran dana untuk pelaksanaan kegiatan dari pihak sekolah. Dana tersebut di gunakan untuk membuat kertas suara saat pemilihan berlangsung, bahkan untuk menyewa terop untuk pemilihan, meskipun tidak besar tapi juga memakan biaya. Pemilihan ketua dan wakil ketua OSIS itu mirip dengan pemilu Negara, oleh karena itu ekonomi adalah sarana penunjangnya juga.

*Integration* (politik). Aspek politik yang ada di SMAN 1 Kertosono salah satunya adalah kotak saran dan kepuasan pelanggan. Melalui kotak saran dan kepuasan pelanggan mereka akan belajar berbicara, berani menyampaikan pendapatnya, memberikan saran serta menyampaikan keluh kesahnya kepada pihak sekolah. Apabila siswa yang tertarik dengan dunia politik maka mereka dapat belajar melalui organisasi di sekolah maupun secara langsung. Siswa akan belajar menghargai pendapat orang lain, tidak bersikap otoriter, bahkan siap menerima saran maupun kritikan yang diberikan. Tak hanya melalui kotak saran dan kepuasan pelanggan siswa dapat memberikan pendapatnya, namun di dalam pembelajaran PPKn di kelas siswa juga dapat langsung menyampaikan pendapatnya di depan umum, karena guru memberikan metode diskusi untuk pembelajarannya. Melalui metode diskusi ini siswa diharap lebih aktif untuk berbicara dan mempunyai keberanian dan tidak takut salah, karena semuanya tujuannya adalah belajar.

Siswa akan belajar untuk bijak dalam menanggapi suatu perbedaan pendapat, berfikir kritis untuk diskusi agar dapat berjalan dengan baik serta mereka dapat menghargai pendapat orang lain. Melalui kegiatan pemilihan ketua dan wakil ketua OSIS adalah salah satu budaya demokrasi yang ada di SMAN 1 Kertosono yang menunjukkan aspek politik. Karena Indonesia menganut sistem pemerintahan demokrasi, yang berarti semua kembali dari rakyat maka dari pemilihan ketua dan wakil ketua OSIS inilah siswa dapat belajar mengenai demokrasi, yang jika esok mereka sudah ada pada masyarakat mereka dapat menerapkannya dengan baik.

*Latency* (budaya). Kroeber (Berry, 1999:324) budaya merupakan keseluruhan kompleks yang terdiri atas pengetahuan, keyakinan, seni, hokum, moral, serta kebiasaan yang dilakukan oleh manusia dalam suatu masyarakat. Budaya yang ada di SMAN 1 Kertosono adalah dengan adanya kotak saran, kepuasan pelanggan, pemilihan ketua atau wakil ketua OSIS, serta metode diskusi yang selalu di ajarkan pada saat pembelajaran di kelas. Dari kebiasaan atau budaya tersebut mengarah pada aspek demokrasi, yang sebagai budaya demokrasi itu sendiri bertujuan untuk menerapkan pendidikan demokrasi pada siswa. Pihak sekolah harus selalu menjaga dan menerapkan kebiasaan-kebiasaan tersebut agar tetap menjadi budaya sekolah dan tetap bertahan dari tahun ke tahun. Agar siswa tidak lupa atau acuh tak acuh pada budaya sekolah tersebut, maka pihak sekolah wajib memberikan sosialisasi kepada siswa mengenai pentingnya budaya sekolah yang ada di SMAN 1 Kertosono.

Strategi yang di gunakan oleh pihak tertentu akan mengalami keberhasilan apabila memenuhi empat syarat yang dikemukakan oleh Talcott Parsons dalam teorinya yaitu teori fungsionalisme struktural. Tentu saja dalam strategi pasti terdapat hambatan yang ditemui karena terdapat syarat yang belum dilakukan dengan baik. Begitupun SMAN 1 Kertosono yang dalam strategi menerapkan pendidikan demokrasi sebagai wujud implementasi nilai-nilai Pancasila mengalami kendala, yang disebabkan dari keempat syarat tersebut masih belum maksimal. Namun tak hanya hambatan saja yang di temui, tetapi pendukung juga terdapat dalam strategi yang di jalankan itu.

Berikut adalah penghambat ketika melaksanakan strategi untuk menerapkan pendidikan demokrasi sebagai wujud implementasi nilai-nilai Pancasila di SMAN 1 Kertosono: (1) Adanya ketidakberanian siswa menyampaikan pendapat maupun kritikan terhadap sekolah. (2) Kurangnya rasa percaya diri sehingga siswa tidak berani menyampaikan keluhannya. (3) Mengundurkan diri dari tes pemilihan kandidat calon ketua / wakil ketua OSIS. (4) Merasa takut untuk berorasi

menyampaikan visi misi di depan umum. (5) Pihak sekolah merasa bingung dengan adanya banyak keluhan pada siswa dan wali siswa yang mengadu di BK sehingga sulit untuk memprioritaskan keluhan mereka. (6) Kurangnya fasilitas yang mendukung untuk menyampaikan pendapat pada sekolah.

Bahkan faktor pendukung juga ada untuk mendukung pelaksanaan strategi sekolah dalam menerapkan pendidikan demokrasi di SMAN 1 Kertosono, di antaranya adalah : (1) Adanya motivasi dan dorongan pada siswa, agar mereka menjadi terbiasa dengan tanggung jawabnya. (2) Selalu memberikan kebebasan siswa untuk berpendapat di dalam kelas maupun di luar kelas. (3) Adanya sosialisasi yang berulang-ulang agar siswa baru atau siswa lama terbiasa untuk dapat percaya diri. (4) Membuat fasilitas yang mendukung untuk menjadikan tempat menyampaikan pendapat atau kritikan para siswa / wali siswa. (5) Membuat beberapa kriteria pengaduan siswa / wali siswa, dan mempertimbangkan yang penting.

Setiap hambatan yang di temui selalu diusahakan agar mendapatkan solusi menanganinya. Dari beberapa hambatan yang temui ketika menjalankan strategi untuk menerapkan pendidikan demokrasi di sekolah, berikut ini adalah solusi untuk meminimalisir hambatan tersebut, antara lain: (a) Diperbanyak adanya kotak saran di setiap lorong kelas X, XII, dan XII. Mensosialisasikan kembali mengenai manfaat dan fungsi yang sebenarnya mengenai adanya kotak saran. Siswa di berikan pengarahan yang luas mengenai di berlakukannya kotak saran, ketika siswa sudah dapat mengerti dan berfikir secara rasional pasti kotak saran akan berjalan sesuai dengan fungsinya. Setelah di adakannya upacara bendera hari Senin adalah waktu yang baik untuk mensosialisasikan, serta dengan bantuan guru BK akan dapat menambah kelancarannya, karena melalui guru BK siswa dapat dengan mudah bertanya atau berpendapat mengenai kotak saran itu. Menambah jumlah kotak saran lagi di setiap lorong kelas X, XI, dan XII agar siswa dapat bergerak aktif dalam berpartisipasi dalam kemajuan sekolahnya. (b) Memberikan motivasi pada siswa saat akan melakukan kegiatan pemilihan ketua OSIS dan wakil ketua OSIS. Para kandidat ketua atau wakil ketua OSIS ini masih kurang percaya diri dengan kemampuannya untuk memimpin dan membuat OSIS lebih baik dari sebelumnya. Mereka cenderung untuk mengundurkan diri dan menunjuk temannya yang lain untuk menjadi kandidat. Namun hal tersebut tidaklah susah untuk para pengurus OSIS senior agar dapat menangani hambatan itu. Mereka memberikan motivasi dan berusaha menyakinkan para kandidat tersebut, bahwa para kandidat mampu melaksanakan tanggung jawab dengan baik serta para kandidat harus percaya diri pada

kemampuan yang di milikinya. Bukan hanya masalah solusi untuk menangani hambatan saat kegiatan pemilihan ketua atau wakil ketua OSIS, karena para pengurus OSIS melaksanakan tahapan-tahapan terlebih dahulu untuk memilih kandidat. Berikut merupakan tahap dalam penyelenggaraan Pemilu, yaitu dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi. (c) Membuat kriteria pengaduan siswa / wali siswa. Solusi yang dapat di tempuh ketika menghadapi hambatan banyaknya pengaduan dari siswa dan wali siswa di BK adalah pihak sekolah tidak terlalu menanggapi masalah yang di anggap tidak terlalu penting, dan tidak mungkin juga pihak sekolah memenuhi segala permintaan dari siswa maupun dari wali murid, karena itu pihak sekolah memberikan beberapa macam kriteria yang terbanyak dari urutan pertama sampai kelima. Dengan adanya kriteria tersebut maka pihak sekolah akan benar-benar mempertimbangkan kepentingan untuk kemajuan sekolah. Berikut adalah kriteria dalam hasil dokumentasi untuk memenuhi kepuasan pelanggan : (1) Keberadaan tenaga pendidik dan pendidikan, (2) Kesesuaian jadwal belajar, (3) Biaya pendidikan, (4) Kompetensi guru karyawan, (5) Prosedur pelayanan, (6) Kelengkapan sarana prasarana, (7) Perlunya kerja sama dengan Perguruan Tinggi, (8) Tersedianya buku, modul, maupun LKS, (9) Tanggung jawab pengajar dan karyawan, (10) Keteraturan administrasi pengajar dan karyawan. Dari kesepuluh kriteria akan di ambil lima teratas untuk dapat memenuhi kepuasan pelanggan secara merata, dan memudahkan pihak sekolah untuk bekerja memperbaikinya.

Dari ketiga solusi yang diberikan agar memperlancar jalannya strategi sekolah untuk menerapkan pendidikan demokrasi, ada pula solusi yang di tempuh untuk memperlancar pembelajaran di kelas menggunakan metode diskusi. Bagi siswa siswa yang belum berani berpendapat atau berbicara di depan kelas maka kelompok penyaji akan memberikan kesempatan untuk bertanya. Guru memberikan pengarahan terlebih dahulu sebelum memulai pelajaran menggunakan metode diskusi, seperti memberikan motivasi pada siswa agar dapat terbuka pikirannya serta menjelaskan bagaimana pentingnya berdiskusi itu agar suatu masalah bisa terpecahkan. Kebebasan dalam berdemokrasi bukan berarti setiap individu memiliki kebebasan yang mutlak, akan tetapi kebebasan tersebut memiliki koridor, sebab kebebasan yang di miliki orang lain juga menjadi batasan (Chamim, 2003:81). Lalu memberikan perintah kepada siswa yang aktif untuk mengajari temnnya yang tidak aktif, di dalam kelas harus selalu belajar bersama agar sama-sama mengerti. Sedangkan jika terjadi perdebatan di dalam kelas antar kelompok maka guru akan menengahnya, memberikan penjelasan yang menjadi

kesimpulan dari pembelajaran yang sudah di laksanakan. Guru memberikan kebebasan kepada seluruh siswa untuk memberikan pendapatnya ketika pembelajaran, dari hal itu siswa akan belajar berbicara dan merasa tidak canggung lagi.

Dari ketiga solusi yang diberikan agar memperlancar jalannya strategi sekolah untuk menerapkan pendidikan demokrasi, ada pula solusi yang di tempuh untuk memperlancar pembelajaran di kelas menggunakan metode diskusi. Bagi siswa siswa yang belum berani berpendapat atau berbicara di depan kelas maka kelompok penyaji akan memberikan kesempatan untuk bertanya. Guru memberikan pengarahan terlebih dahulu sebelum memulai pelajaran menggunakan metode diskusi, seperti memberikan motivasi pada siswa agar dapat terbuka pikirannya serta menjelaskan bagaimana pentingnya berdiskusi itu agar suatu masalah bisa terpecahkan. Kebebasan dalam berdemokrasi bukan berarti setiap individu memiliki kebebasan yang mutlak, akan tetapi kebebasan tersebut memiliki koridor, sebab kebebasan yang di miliki orang lain juga menjadi batasan (Chamim, 2003:81). Lalu memberikan perintah kepada siswa yang aktif untuk mengajari temnnya yang tidak aktif, di dalam kelas harus selalu belajar bersama agar sama-sama mengerti. Sedangkan jika terjadi perdebatan di dalam kelas antar kelompok maka guru akan menengahnya, memberikan penjelasan yang menjadi kesimpulan dari pembelajaran yang sudah di laksanakan. Guru memberikan kebebasan kepada seluruh siswa untuk memberikan pendapatnya ketika pembelajaran, dari hal itu siswa akan belajar berbicara dan merasa tidak canggung lagi.

## PENUTUP

### Simpulan

Strategi yang digunakan untuk menerapkan pendidikan demokrasi sebagai wujud implementasi nilai-nilai Pancasila pada siswa di SMAN 1 Kertosono yakni : (1) pembelajaran di kelas melalui metode diskusi, (2) pemilihan ketua dan wakil ketua OSIS, (3) kepuasan pelanggan, (4) serta adanya kotak saran.

Namun adanya budaya demokrasi itu tidak berjalan semulus apa yang di pikirkan. Terdapat faktor pendorong dan penghambat dari masing-masing budaya demokrasi, di antaranya adalah kotak saran yang dapat membantu siswa untuk menyampaikan pendapatnya maupun kritikan kepada pihak sekolah, namun kurangnya rasa keberanian siswa untuk memasukkan kotak saran itu menjadi penghambatnya. Siswa dapat menyampaikan keluhan ataupun kritikan untuk pihak sekolah secara langsung kepada guru BK, dengan banyaknya keluhan dari siswa maupun dari wali murid maka pihak sekolah kewalahan untuk memprioritaskan masalah itu. Adanya

kegiatan pemilihan ketua dan wakil ketua OSIS maka siswa dapat secara langsung memilih kandidat yang dianggap mereka mampu memperbaiki dan membawa kepengurusan OSIS menjadi lebih baik lagi, namun penghambat dari kegiatan tersebut adalah susahannya untuk mencari kandidat dan mereka masih kurang rasa percaya diri untuk memimpin serta masih ada rasa takut. Tak hanya budaya itu saja, melainkan pada saat pembelajaran di kelas guru menggunakan metode diskusi, yang dapat melatih siswa untuk tampil berani di depan umum serta melatihnya untuk dapat berpendapat ketika pembelajaran berlangsung, tetapi ada penghambat dalam pembelajaran, siswa ada yang pasif dan tidak berani untuk berpendapat maupun bertanya.

Solusi yang ditempuh untuk mengatasi hambatan adalah mengadakan sosialisasi untuk kotak saran, memberi pengarahan pada kandidat, mengadakan LDKMS, menetapkan 10 prioritas utama dalam kepuasan pelanggan, serta memberi motivasi dan penjelasan pada siswa tentang diskusi yang baik. Pihak sekolah juga memberikan tanggapannya terhadap apa yang siswa keluhkan dengan dirapatkan terlebih dahulu serta akan menindaklanjutinya, semaksimal mungkin memenuhi kebutuhan siswa agar merasa nyaman di sekolah karena pendapatnya di dengar oleh pihak sekolah.

#### **Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka terdapat saran sebagai berikut: (1) Bagi SMAN 1 Kertosono sebaiknya melakukan sosialisasi secara rutin sehingga semua budaya demokrasi yang ada bisa berjalan dengan lancar dan bisa diikuti oleh semua siswa sebagai upaya menerapkan pendidikan demokrasi pada siswa. (2) Bagi siswa hendaknya lebih antusias dan lebih aktif lagi untuk mengikuti semua budaya demokrasi yang ada di SMAN 1 Kertosono tanpa terkecuali. Rasa percaya diri, tanggung jawab, dan keberanian siswa harus dimaksimalkan lagi demi terciptanya kebiasaan untuk menerapkan pendidikan demokrasi pada siswa. (3) Bagi sekolah lain bisa menjadikan bahan pertimbangan untuk melakukan hal yang serupa sebagai pengupayaan mewujudkan Negara demokrasi melalui penerapan pendidikan demokrasi pada siswa di setiap lembaga pendidikan.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Arikunto. 2006. *Metode Penelitian*. Jakarta: Pustaka Belajar.
- Budiarjo, Miriam. 2007. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Chamim, Asyakuri ibn. 2003. *Pendidikan Kewarganegaraan*. Yogyakarta: Majelis Pendidikan Tinggi, Penelitian dan Pengembangan (Diktilitbang) Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Dkk.

- Creswell, W, John. 2010. *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Fachruddin, Fuad. 2006. *Agama dan Pendidikan Demokrasi*. Jakarta: Pustaka Alfabet.
- Fuady, Munir. 2010. *Konsep Negara Demokrasi*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Kaelan. 2002. *Filsafat Pancasila*. Yogyakarta: Paradigma.
- Maleong, J, Lexy. 2008. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Nurtjahjo, Hendra. 2006. *Filsafat Demokrasi*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Prayitno. 2009. *Demokrasi*. Jakarta: Pusaka Alfabet.
- Ritzer, George, dan Goodman, J. Douglas. 2008. *Teori Sosiologi Modern*. Jakarta: Prenada Media.
- Soedarsih. 2009. *Budaya dan Sistem Politik Indonesia*. Surabaya: Unesa University Press.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Tim Nasional Dosen Pendidikan Kewarganegaraan. 2011. *Pendidikan Kewarganegaraan Paradigma Terbaru Untuk Mahasiswa*. Bandung: Alfabeta.
- Wahana, Paulus. 1993. *Filsafat Pancasila*. Yogyakarta: Pustaka Filsafat.
- Wignjosebroto, Soetandyo. 2013. *Sejarah dan Budaya Demokrasi*. Malang: Averroes Press.
- Winataputra, U.S dan Budimansyah, D. 2007. *Civic Education: Konteks Landasan, Bahan Ajar dan Kultur Kelas*. Bandung: Prodi Pkn SPS UPI.
- Zamroni. 2011. *Pendidikan Demokrasi pada Masyarakat Multikultural*. Yogyakarta: Gavin Kalam Utama
- Nasiwan. 2004. *Pendidikan Politik Bagi Para Pemilih Menyongsong Pemilu 2004, Informasi, Kajian Masalah Pendidikan dan Ilmu Sosial*, Jurnal No.1 Tahun 2004.
- Undang-Undang Dasar 1945.
- Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 700.



**UNESA**

**Universitas Negeri Surabaya**